



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623), perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penggunaannya pada Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal, selanjutnya disingkat dengan BHPDM dan BHRDM dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari.
8. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional, selanjutnya disingkat dengan BHPDP dan BHRDP dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

14. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah atas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari dihitung berdasarkan azas merata dan berkeadilan yaitu :
 - a. Azas merata adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut BHPDM dan BHRDM; dan
 - b. Azas adil adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Nagari Proporsional.

Pasal 4

Besaran persentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDM dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDP dalam Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah :

- a. Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi rata untuk setiap Nagari;

- b. Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagai berikut :

$AF \text{ Nagari} = (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4) \times \text{Nagari}$
Keterangan:

- AF = Alokasi Formula setiap Nagari
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dimasukan dalam APB Nagari tahun yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN dilaksanakan bertahap meliputi :
 - a. Tahap I, pada bulan Juli sebesar realisasi pajak dan retribusi Kabupaten sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
 - b. Tahap II, pada bulan November sebesar realisasi pajak dan retribusi Kabupaten sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan.

- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN untuk :
- Tahap I dapat dibayarkan apabila realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di nagari bersangkutan minimal mencapai 50% (lima puluh persen).
 - Tahap II dapat dibayarkan apabila realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di nagari bersangkutan minimal mencapai 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN setelah Bupati menerima Peraturan Nagari mengenai APB Nagari.

BAB V

PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat digunakan untuk :
- 50% (lima puluh persen) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
 - 50% (lima puluh persen) untuk penunjang operasional penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - ✓ Setiap pendistribusian dan pemungutan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2 bernilai Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/lembar, yang ditetapkan berdasarkan angka realisasi.
 - ✓ Setiap penggunaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) untuk penambahan data baru atau pemutakhiran data Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bernilai Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)/lembar, yang ditetapkan berdasarkan angka realisasi.
- (2) Pengelolaan keuangan Nagari Tahun Anggaran dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan APB Nagari.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua Bulan Juli tahun berjalan melalui camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikut.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

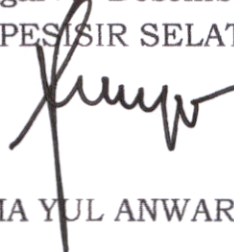
- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4); dan
 - b. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah (Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) atau Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari.
- (2) Penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal ~~30~~ Desember 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal ~~30~~ Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 133

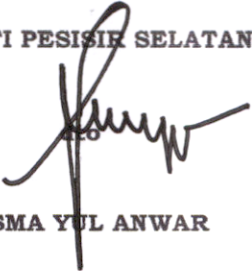
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KE NAGARI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
1	KOTO IX TARUSAN	SIGUNTUR	6.099.440	4.383.770	6.828.122	17.311.333
2		SUNGAI PINANG	6.427.765	4.619.742	2.277.174	13.324.682
3		DUKU	8.554.403	6.148.194	8.771.964	23.474.561
4		BATU HAMPA	6.358.290	4.569.810	5.574.639	16.502.739
5		NANGGALO	6.130.718	4.406.250	7.894.308	18.431.277
6		AMPANG PULAI	6.365.378	4.574.904	7.999.854	18.940.137
7		KAPUH	7.599.921	5.462.191	8.255.224	21.317.336
8		BARUNG-BARUNG BALANTAI	5.497.780	3.951.347	10.042.631	19.491.758
9		BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN	5.406.097	3.885.452	5.368.880	14.660.430
10		MANDEH	6.516.150	4.683.267	5.146.071	16.345.488
11		KAPUAH UTARA	5.901.515	4.241.518	2.944.645	13.087.679
12		TARATAK SUNGAI LUNDANG	6.701.726	4.816.643	1.908.683	13.427.052
13		SIGUNTUR TUA	5.287.805	3.800.434	1.327.740	10.415.979
14		KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	6.625.528	4.761.878	3.520.871	14.908.278
15		DUKU UTARA	5.959.799	4.283.407	7.873.089	18.116.296
16		PULAU KARAM AMPANG PULAI	6.099.699	4.383.956	3.155.225	13.638.881
17		JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI	6.142.344	4.414.606	3.731.819	14.288.769
18		CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	5.305.810	3.813.375	4.779.195	13.898.380
19		SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	5.697.326	4.094.764	12.366.422	22.158.513
20		BATU HAMPAR SELATAN	6.350.808	4.564.433	2.357.638	13.272.879
21		BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	5.823.486	4.185.437	2.822.178	12.831.102
22		BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH	5.445.842	3.914.018	4.171.626	13.531.486
23		SETARA NANGGALO	6.288.569	4.519.700	9.794.381	20.602.650
24	BAYANG	KOTO BERAPAK	5.501.792	3.954.231	6.940.973	16.396.996
25		TALAOK	6.709.281	4.822.073	4.625.534	16.156.888
26		PASAR BARU	6.510.413	4.679.143	6.549.834	17.739.391
27		GURUN PANJANG	5.469.006	3.930.667	5.290.369	14.690.042
28		API-API PASAR BARU	5.794.683	4.164.736	4.002.988	13.962.408
29		TANJUNG DURIAN PASAR BARU	5.839.742	4.197.121	3.568.385	13.605.248
30		ASAM KAMBA PASAR BARU	6.218.712	4.469.493	4.214.576	14.902.781
31		SAWAH LAWEH PASAR BARU	6.325.797	4.546.456	7.280.735	18.152.988
32		KAPEH PANJI JAYA TALAOK	6.395.517	4.596.565	4.525.341	15.517.423
33		AUR BEGALUNG TALAOK	5.922.277	4.256.440	6.376.815	16.555.532
34		KAPELGAM KOTO BERAPAK	6.038.301	4.339.828	5.210.343	15.588.473
35		KOTO BARU KOTO BERAPAK	5.916.296	4.252.141	3.540.265	13.708.702
36		KUBANG KOTO BERAPAK	5.422.540	3.897.270	6.404.598	15.724.409
37		KAPUJAN KOTO BERAPAK	6.153.968	4.422.960	3.984.447	14.561.376
38		GURUN PANJANG UTARA	6.652.315	4.781.131	7.273.098	18.706.544
39		GURUN PANJANG BARAT	5.381.636	3.867.872	3.620.578	12.870.087
40		GURUN PANJANG SELATAN	5.670.645	4.075.587	5.673.997	15.420.230
41	BAYANG UTARA	PULUIK-PULUIK	6.845.967	4.920.311	4.012.822	15.779.101
42		KOTO RANAH	5.503.235	3.955.267	3.186.730	12.645.233
43		MUARO AIE	5.162.826	3.710.610	1.839.002	10.712.438
44		PANCUANG TABA	5.929.612	4.261.712	3.356.083	13.547.407
45		PULUIK-PULUIK SELATAN	6.157.149	4.425.247	4.301.962	14.884.358
46		LIMAU GADANG PANCUNG TABA	6.329.292	4.548.969	1.870.400	12.748.661
47	IV JURAI	PAINAN	5.430.625	3.903.081	37.908.560	47.242.267
48		TAMBANG	5.799.107	4.167.915	3.536.087	13.503.110
49		SALIDO	7.128.738	5.123.544	29.884.694	42.136.977
50		LUMPO	5.207.785	3.742.922	3.555.355	12.506.063
51		BUNGA PASANG SALIDO	6.758.504	4.857.450	10.749.932	22.365.887
52		SAGO SALIDO	6.066.172	4.359.860	31.875.870	42.301.903
53		SALIDO SARI BULAN	5.978.208	4.296.638	3.255.805	13.530.652
54		KOTO RAWANG	5.690.262	4.089.687	2.563.867	12.343.817
55		LIMAU GADANG LUMPO	5.907.801	4.246.036	2.207.821	12.361.659
56		BATU KUNIK LUMPO	5.226.220	3.756.172	2.872.534	11.854.926
57		TARATAK TANGAH LUMPO	5.933.722	4.264.666	2.751.292	12.949.680
58		AMPUAN LUMPO	5.286.188	3.799.272	1.925.126	11.010.587
59		AMPANG TAREH LUMPO	5.392.539	3.875.708	2.749.163	12.017.410
60		BALAI SINAYAN LUMPO	5.257.567	3.778.701	2.584.326	11.620.595
61		SUNGAI GAYO LUMPO	5.080.874	3.651.709	2.505.510	11.238.093
62		SUNGAI SARIK LUMPO	5.240.642	3.766.537	1.707.092	10.714.272
63		BUKIK KACIAK LUMPO	5.289.099	3.801.364	2.765.168	11.855.631
64		GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	5.446.526	3.914.509	1.324.209	10.685.245
65		PAINAN SELATAN PAINAN	5.833.579	4.192.691	24.411.620	34.437.890
66		PAINAN TIMUR PAINAN	6.069.375	4.362.162	20.327.816	30.759.353

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
67	BATANG KAPAS	IV KOTO HILIE	8.453.348	6.075.563	30.895.895	45.424.807
68		IV KOTO MUDIEK	5.695.181	4.093.222	10.303.389	20.091.792
69		TALUAK	5.749.680	4.132.392	8.086.484	17.968.557
70		KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	7.787.373	5.596.916	13.653.884	27.038.173
71		KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	6.431.276	4.622.266	9.426.598	20.480.140
72		TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	6.400.058	4.599.829	4.121.202	15.121.090
73		TUIK IV KOTO MUDIEK	5.721.795	4.112.350	9.546.460	19.380.605
74		SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	6.225.977	4.474.714	9.335.197	20.035.889
75	SUTERA	TALUK TIGO SAKATO	5.582.390	4.012.157	8.688.127	18.282.674
76		TARATAK	6.297.868	4.526.383	6.862.561	17.686.813
77		SURANTIH	7.781.975	5.593.037	17.388.775	30.763.787
78		AMPING PARAK	9.178.934	6.597.054	36.674.635	52.450.624
79		AMPING PARAK TIMUR	6.958.467	5.001.167	20.528.543	32.488.177
80		KOTO TARATAK	5.535.995	3.978.812	6.742.085	16.256.893
81		LANSANO TARATAK	6.290.778	4.521.288	5.598.418	16.410.484
82		AUR DURI SURANTIH	7.564.089	5.436.438	11.593.880	24.594.407
83		RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH	7.269.013	5.224.362	7.566.771	20.060.147
84		KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	6.722.053	4.831.252	10.282.051	21.835.357
85	LENGAYANG	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	6.228.895	4.476.811	7.054.256	17.759.963
86		GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH	5.923.745	4.257.495	8.874.401	19.055.641
87		GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH	7.820.752	5.620.906	3.796.345	17.238.004
88		KAMBANG	8.250.027	5.929.433	32.944.908	47.124.369
89		LAKITAN	6.681.825	4.802.340	16.652.630	28.136.795
90		KAMBANG UTARA	8.965.059	6.443.339	44.027.867	59.436.265
91		KAMBANG TIMUR	8.360.554	6.008.871	17.986.453	32.355.878
92		KAMBANG BARAT	8.215.887	5.904.896	35.440.010	49.560.793
93		LAKITAN UTARA	7.118.220	5.115.985	18.400.302	30.634.507
94		LAKITAN SELATAN	8.022.026	5.765.565	16.158.545	29.946.137
95	RANAH PESISIR	LAKITAN TIMUR	5.754.025	4.135.514	6.892.146	16.781.685
96		LAKITAN TENGAH	6.577.033	4.727.024	11.601.536	22.905.594
97		PELANGAI	5.609.037	4.031.309	16.775.877	26.416.224
98		SUNGAI TUNU	6.024.014	4.329.560	13.725.457	24.079.031
99		SUNGAI TUNU UTARA	7.037.952	5.058.294	17.066.882	29.163.129
100		SUNGAI TUNU BARAT	6.140.561	4.413.324	20.179.056	30.732.942
101		NYIUR MELAMBAI PELANGAI	6.448.580	4.634.703	24.569.906	35.653.189
102		SUNGAI LIKU PELANGAI	7.285.601	5.236.284	15.931.192	28.453.077
103		KOTO VIII PELANGAI	6.711.882	4.823.942	20.819.418	32.355.243
104		PELANGAI GADANG	5.759.760	4.139.636	9.764.570	19.663.967
105	AIR PURA	PELANGAI KACIAK	5.756.596	4.137.362	10.801.445	20.695.403
106		PASIA PELANGAI	6.369.693	4.578.005	20.777.059	31.724.758
107		INDERAPURA UTARA	5.345.830	3.842.138	9.413.142	18.601.110
108		MUARA INDERAPURA	5.214.488	3.747.741	9.848.813	18.811.043
109		DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	5.267.461	3.785.813	8.473.064	17.526.338
110		LALANG PANJANG INDERAPURA	5.001.552	3.594.700	11.237.481	19.833.733
111		PALOKAN INDERAPURA	5.692.168	4.091.057	8.992.996	18.776.223
112		LUBUK BETUNG INDERAPURA	5.451.513	3.918.094	3.455.757	12.825.365
113		TLUK KUALO INDERAPURA	5.826.246	4.187.421	5.290.023	15.303.691
114		TANAH BAKALI INDERAPURA	5.597.196	4.022.799	11.493.426	21.113.422
115	LINGGO SARI BAGANTI	INDERAPURA TIMUR	5.822.505	4.184.732	8.398.368	18.405.606
116		PULAU RAJO INDERAPURA	5.435.123	3.906.314	3.126.466	12.467.904
117		PUNGGASAN	5.545.710	3.985.795	5.186.545	14.718.050
118		AIR HAJI	5.716.549	4.108.580	9.679.121	19.504.250
119		PUNGGASAN UTARA	6.702.231	4.817.006	12.778.473	24.297.710
120		PUNGGASAN TIMUR	6.326.208	4.546.752	8.844.500	19.717.461
121		PADANG XI PUNGGASAN	6.485.575	4.661.292	7.898.697	19.045.564
122		LAGAN MUDIK PUNGGASAN	5.340.512	3.838.316	6.013.429	15.192.258
123		LAGAN HILIR PUNGGASAN	5.769.889	4.146.916	9.780.825	19.697.631
124		AIR HAJI TENGGARA	7.142.520	5.133.449	7.164.324	19.440.293
125		PASAR LAMA MUARA AIR HAJI	6.245.772	4.488.941	6.765.737	17.500.450
126		PASAR BUKIT AIR HAJI	6.151.308	4.421.048	7.256.793	17.829.150
127		AIR HAJI BARAT	5.904.110	4.243.383	4.624.702	14.772.195
128		AIR HAJI TENGAH	6.533.588	4.695.799	6.493.846	17.723.234
129		RANTAU SIMALENANG AIR HAJI	6.197.468	4.454.224	10.541.533	21.193.225
130		MUARA GADANG AIR HAJI	6.054.125	4.351.202	3.944.508	14.349.835
131		SUNGAI SIRAH AIR HAJI	5.717.433	4.109.215	4.680.783	14.507.432
132		MUARA KANDIS PUNGGASAN	5.650.629	4.061.202	3.233.307	12.945.139

No.	Kecamatan	Nama Desa				Total
			Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
133	PANCUNG SOAL	INDERAPURA	6.080.844	4.370.404	15.006.593	25.457.842
134		MUARO SAKAI INDERAPURA	6.319.910	4.542.226	6.316.730	17.178.866
135		TIGA SEPAKAT INDERAPURA	5.535.585	3.978.518	4.919.161	14.433.265
136		INDERAPURA BARAT	5.258.967	3.779.708	2.622.649	11.661.324
137		KUDO-KUDO INDERAPURA	6.194.050	4.451.767	6.879.420	17.525.238
138		INDERAPURA SELATAN	5.743.843	4.128.197	6.558.650	16.430.690
139		SIMPANG LAMA INDERAPURA	5.663.195	4.070.233	12.132.249	21.865.678
140		TIGO SUNGAI INDERAPURA	5.396.219	3.878.353	10.694.247	19.968.819
141		TLUK AMPLU INDERAPURA	5.239.947	3.766.038	10.836.845	19.842.831
142		INDERAPURA TENGAH	6.129.987	4.405.725	3.765.990	14.301.702
143	BASA AMPEK BALAI TAPAN	TAPAN	5.505.613	3.956.977	1.710.245	11.172.836
144		PASAR TAPAN	4.824.035	3.467.115	5.098.258	13.389.409
145		BATANG ARAH TAPAN	5.568.206	4.001.964	3.246.119	12.816.289
146		AMPANG TULAK TAPAN	5.313.629	3.818.994	4.365.858	13.498.482
147		TANJUNG PONDOK TAPAN	5.651.590	4.061.893	4.141.838	13.855.322
148		BATANG BETUNG TAPAN	5.095.881	3.662.495	4.624.811	13.383.188
149		BUKIT BUAI TAPAN	5.121.583	3.680.968	3.343.211	12.145.764
150		RIAK DANAU TAPAN	5.682.558	4.084.150	4.736.256	14.502.965
151		KOTO ANAU TAPAN	5.263.421	3.782.910	1.867.626	10.913.958
152		DUSUN BARU TAPAN	5.196.082	3.734.511	1.798.890	10.729.485
153	RANAH AMPEK HULU TAPAN	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	5.310.548	3.816.780	3.539.929	12.667.258
154		LIMAU PURUT TAPAN	5.423.068	3.897.650	3.829.060	13.149.779
155		TALANG BALARIK TAPAN	6.779.351	4.872.434	4.347.968	15.999.754
156		TEBING TINGGI TAPAN	5.759.838	4.139.693	4.067.848	13.967.380
157		BINJAI TAPAN	5.197.979	3.735.875	3.818.522	12.752.377
158		SUNGAI PINANG TAPAN	5.856.596	4.209.235	3.557.867	13.623.699
159		TALANG KOTO PULAI TAPAN	5.554.515	3.992.124	3.080.083	12.626.723
160		KAMPUNG TENGAH TAPAN	5.482.447	3.940.327	5.460.814	14.883.589
161		KUBU TAPAN	5.372.905	3.861.597	3.609.053	12.843.556
162		SIMPANG GUNUNG TAPAN	5.566.489	4.000.729	3.639.087	13.206.305
163	LUNANG	LUNANG	6.415.549	4.610.963	9.183.444	20.209.958
164		LUNANG UTARA	5.796.925	4.166.348	3.741.829	13.705.103
165		LUNANG SELATAN	5.231.411	3.759.903	12.525.322	21.516.638
166		LUNANG BARAT	5.075.792	3.648.057	9.677.249	18.401.099
167		SINDANG LUNANG	5.134.851	3.690.504	12.190.640	21.015.996
168		PONDOK PARIAN LUNANG	4.999.983	3.593.572	3.774.493	12.368.049
169		LUNANG TENGAH	5.430.466	3.902.967	3.179.256	12.512.690
170		LUNANG SATU	5.161.108	3.709.375	6.574.872	15.445.356
171		LUNANG DUA	5.449.101	3.916.361	24.987.140	34.352.602
172		LUNANG TIGA	5.067.110	3.641.817	21.619.140	30.328.069
173	SILAUT	SILAUT	6.493.588	4.667.051	25.553.686	36.714.326
174		SUNGAI SIRAH	5.457.758	3.922.583	12.155.492	21.535.834
175		SUNGAI SARIK	5.256.316	3.777.803	12.723.613	21.757.733
176		SUNGAI PULAI	5.553.735	3.991.563	17.183.696	26.728.995
177		PASIR BINJAI	5.130.682	3.687.508	12.877.153	21.695.343
178		TALANG BINJAI	5.127.870	3.685.486	12.395.471	21.208.828
179		DURIAN SERIBU	5.255.305	3.777.076	20.801.475	29.833.857
180		LUBUK BUNTA	5.015.476	3.604.707	13.676.114	22.296.298
181		AIR HITAM	5.367.730	3.857.878	17.533.554	26.759.164
182		SAMBUNGO	5.307.554	3.814.628	5.294.646	14.416.828
Total			1.094.123.632	786.365.117	1.651.440.222	3.531.928.972

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR